

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yaitu Belanja modal dan Investasi sebagai variabel bebas (independent) dan kemandirian keuangan sebagai variabel terikat (dependent).

3.1.2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dilakukan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.depkeu.djpk.go.id. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal, investasi. Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan yang diproksikan oleh PAD dan Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman bersumber dari LRA Kabupaten kota se- Sumatera.

3.3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah data yang berasal dari LRA kabupaten kota Se-Sumatera selama 2 tahun yaitu 2010 dan 2011. Pengambilan data berasal dari belanja modal, investasi, dan kemandirian keuangan daerah yang di proxycyan dari PAD dibagi bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Kota/Kabupaten Se-Sumatera berjumlah 277 kabupaten untuk tahun 2010 sebanyak 116 dan tahun 2011 sebanyak 161. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota Se- Sumatera pada tahun 2010-2011 sampel yang terdata 185 setelah di outlier hanya 139 sampel saja yang terpakai. Data sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu:

1. Daerah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera yang mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2010-2011.
2. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada data penyertaan modal saham pada kurun waktu 2010 -2011.

Sampel yang terdata 277 daerah kota dan kabupaten yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 185 sampel setelah di outlier hanya 139 yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai sampel penelitian. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Dari laporan realisasi APBD tahun 2010-2011 dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Investasi, Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut data tabel sampel penelitian ini sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Sampel Kabupaten kota Se-Sumatera	277
Kabupaten kota yang tidak ada investasi	92
Kabupaten kota yang masuk sampel penelitian	185
Data kabupaten kota yang tidak mewakili (<i>outlier</i>)	46
Data kabupaten kota mewakili sampel	139

3.5. Variabel Penelitian

3.5.1. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern, terutama pemerintah pusat dan propinsi, semakin rendah. Selain itu rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Halim, 2007:232).

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat dan pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian kemandirian (Nataluddin, 2001:169 dalam Widowati 2006) adalah 0-25% rendah sekali, 25-50% rendah, 50-75% sedang, dan 75-100% tinggi. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber PAD menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya di di banyak daerah, PAD tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran, proporsinya terhadap pendapatan selain dari PAD merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah (Hariyadi, 2002:27).

Kemandirian keuangan dapat menunjang dalam pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah (Adi & Harianto, 2007).

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintahan daerah dari hasil penelitian terdahulu, analisis Penelitian ini juga memakai analisa kinerja keuangan yang telah dikembangkan oleh Musgrave, Richard A dan B. Musgrave, Peggy dalam bukunya "*Public Finance in Theory and Practice*". (Hadiprojo, Ekonomi Publik hal. 155) Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu :

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004).

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai

badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- 2) Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah menurut Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Selanjutnya, dalam Pasal 58 dinyatakan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak terduga yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Total belanja daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

Karena dalam pelaksanaannya penelitian ini mengalami masalah dengan pengumpulan data dan keterbatasan waktu maka dengan keterbatasan tersebut peneliti tidak menggunakan semua rasio tersebut. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian/kemampuan

Indikator tingkat kemandirian keuangan :

1 Dana Transfer.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain

DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

2. Lain – lain pendapatan yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Yani (2008:211-212) menyatakan bahwa cakupan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Menurut UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164, menyebutkan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Dana Perimbangan, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Secara teoritis pengukuran kemandirian daerah diukur dari PAD. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Namun di dalam perkembangan selanjutnya, diantara semua komponen PAD, pajak dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar, sehingga muncul anggapan bahwasanya PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah. Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Yani (2008:44) menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Dan Lain-lain PAD yang sah.

3.5.2. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel pengelolaan belanja diukur dengan melihat laporan realisasi anggaran se-Sumatera

3.5.3. Investasi daerah

Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan asset, tujuannya untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dilakukan dengan penyertaan modal berupa saham, pemerintah mendapatkan deviden dari saham tersebut. Tujuan dari penyertaan modal berupa saham ini adalah untuk mengembangkan modal pemerintah daerah. Deviden yang didapat digunakan untuk pembangunan pelayanan masyarakat dan pengelolaan kembali. Hal ini sesuai dengan permen no 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi daerah dan di perkuat dengan PP no 8 tahun 2007 tentang investasi pemerintah. Perhitungan investasi didasarkan laporan realisasi anggaran setiap daerah se-Sumatera.

3.5.1.1. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan

ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Sekaran, 2006).

Variabel dependennya merupakan variabel Kemandirian Keuangan yang merupakan kemampuan keuangan daerah didalam melaksanakan proses kegiatan daerah kabupaten kota. Kemandirian keuangan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2010)

Variabel independen variable investasi merupakan penyertaan modal berupa saham yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil untuk pembangunan. Investasi untuk masing-masing Kabupaten / Kota dapat dilihat dari pos pembiayaan investasi berupa penyertaan modal didalam Laporan Realisasi APBD.

Sedangkan Variabel independen yang lain adalah belanja modal. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Indikator variabel ini diukur dengan :

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan,}$$

- Variabel Bebas (Independen)

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena variabel ini tidak dipengaruhi oleh variabel *antiseden* (sebelumnya). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja modal dan Investasi.

- Variabel Terikat (Dependen)

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa disebut variabel dependen karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan.

3.5.1.2. Statistik Deskriptif

Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan kata lain hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Belanja modal, Investasi, dan tingkat kemandirian keuangan.

3.5.1.3. Uji Regresi Berganda

Regresi linier berganda adalah untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja modal dan pembiayaan investasi daerah.

$$Y_{KM} = \alpha + \beta_1 BM + \beta_2 PI + \varepsilon$$

Sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dimana :

Y_{KM} : Kinerja Keuangan dilihat dari kemandirian

BM : Belanja Modal

PI : Pembiayaan Investasi

α : Konstanta

β_1, \dots, β_6 : Koefisien Regresi

ε : *error item*

i : 1,2,..., N dimana N adalah banyaknya observasi

Regresi linier berganda pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang diuji secara bersama – sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi linier berganda secara simultan dilakukan uji t pada tingkat keyakinan 95% dan tingkat kesalahan dalam analisis (α) = 5%.

Kriteria pengambilan keputusan atas uji t antara variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

- Jika nilai hitung $t >$ nilai t tabel $t_{\alpha(n-k)}$, maka H_a diterima yang berarti X berpengaruh terhadap Y . α adalah tingkat signifikansi dan $(n-k)$ derajat bebas yaitu jumlah n observasi dikurangi jumlah variabel independen dalam model.
- Jika nilai hitung $t <$ nilai t tabel $t_{\alpha(n-k)}$, maka H_a Ditolak yang berarti X tidak berpengaruh terhadap Y .

3.5.1.4. Uji Normalitas

Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah uji normalitas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan sudah representatif sehingga kesimpulan penelitian yang diambil dari sejumlah sampel dapat dipertanggungjawabkan (Teddy Rusman, 2008). Pengujian normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov test* yang dibantu dengan program olah data statistik yaitu *SPSS17*.

Kriteria pengambilan keputusan atas uji normalitas data sampel tersebut yaitu data sampel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi (sig) > 0.05 , dan sebaliknya data sampel berdistribusi tidak normal jika nilai signifikansi (sig) < 0.05 . Selain itu, pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik, dimana terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal tersebut.

3.5.1.5 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model regresi memiliki hubungan yang kuat.

Hubungan tersebut dikatakan hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna. Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi / keterkaitan antar variabel independen (bebas) dan hubungannya secara linier.

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Karena hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Karena hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai *tolerance* serta *variance inflation factor (VIF)*. Nilai VIF yang diperkenankan adalah 10. Multikolinieritas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 yang berarti terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel bebas dan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (koefisien lemah tidak lebih besar dari 5) . Jika *VIF* lebih besar dari 10, apabila *VIF* kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

3.5.1.6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain untuk variabel independen yang berbeda. Jika *variance* (ragam) dari residual satu

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park (Ghozali, 2009).

3.5.1.7. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson (Gujarati, 2010).

Cara menentukan atau kriteria pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika $d < d_L$ maka terdapat autokorelasi positif,

Jika $d > d_U$ maka **tidak** terdapat autokorelasi positif,

Jika $d_L < d < d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika $(4 - d) < d_L$ maka terdapat autokorelasi negatif,

Jika $(4 - d) > d_U$ maka **tidak** terdapat autokorelasi negatif,

Jika $d_L < (4 - d) < d_U$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

3.5.1.8. Pengujian Hipotesis

- Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi (Sig. < 0,05), maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak.
2. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig. > 0,05), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.
3. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka model penelitian sudah layak.

- Uji Statistik t

Uji Statistik t untuk menguji secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$). Uji ini dilakukan sekaligus untuk melihat koefisien regresi secara individual variabel penelitian (Ghozali, 2009). Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel penarikan simpulan pada uji ini didasarkan pada :

- Jika t hitung > t table, H_a ditolak
- Jika t hitung < t table, H_a diterima